



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Februari 2017

Halaman: 1

SOAL TINGGINYA SURAT SUARA TAK SAH

Timeses Imam-Fadli Tuntut KPU Transparan

YOGYA (MERAPI) - Tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Pilkada Kota Yogya, Imam Priyono-Achmad Fadli mempertanyakan proses rekapitulasi suara yang kini dilakukan di tingkat kecamatan. Terutama terkait surat suara tidak sah karena jumlahnya cukup tinggi. Permohonan saksi tim paslon 1 untuk membuka surat suara tidak sah guna memastikan ada tidaknya kecurangan sudah ditolak.

Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1, Danang Rudiatmoko menilai ada kegagalan terkait permohonan dari saksi paslon 1 untuk membuat surat suara tak sah. Mengingat jumlah surat suara tidak sah begitu besar sekitar 14.000.

** Bersambung ke halaman 9*

Timeses

"Kami ingin melihat ketidaksihan itu. Tapi Panwas dan PPK tidak mau mengizinkan permohonan itu," kata Danang, Jumat (17/2).

Dia menuturkan, dari sekitar 10 rekap suara di tingkat kecamatan pada Kamis (16/2), sebagian ada yang menyepakati pembukaan surat suara tidak sah dari sebagian Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti di Kotagede. Oleh sebab itu timnya akan mengawal rekap suara dan berupaya agar surat suara tidak sah dibuka dan dihitung ulang.

"Perlu adanya keterbukaan. Ini bukan kami memper tahankan posisi. Tapi untuk melindungi hak konstitusi pemilih yang sudah memberikan haknya," ujarnya.

Pihaknya juga mempertanyakan dasar KPU melakukan perhitungan suara *realcount* dari formulir C1 dan mempublikasikannya sebelum perhitungan rekap berjenjang selesai. Dia menyampaikan hal itu dapat membangun opini di masyarakat dan membuat keresahan.

Sebelumnya, tim sukses Imam-Fadli mendesak KPU membuka surat suara tak sah yang jumlahnya ribuan. Alasannya, ada kesalahan dalam menentukan surat suara tak sah. Misalnya, mencoblos dua kali dalam satu kotak dianggap tak sah, padahal hal itu sah sesuai peraturan KPU.

Menanggapi protes ini, Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyo menyatakan KPU dan PPK berupaya menjalankan tugas sesuai peraturan dan transparan. Termasuk dalam pembukaan kotak surat surat tidak sah dapat dilakukan jika ada perbedaan data yang dimiliki oleh saksi.

Menurutnya penentuan surat suara sah dan tidak sah sudah selesai di tingkat TPS.

"Kalau ada perbedaan data, sandingkan data dengan plano C1. Kalau masih beda baru membuka kotak dan harus ada persetujuan Panwas," tambah Wawan.

Terkait data C1 yang diunggah di website KPU RI, dia menuturkan KPU daerah hanya menjalankan peraturan karena pengunggahan data itu agar masyarakat dapat mengontrol hasil pemungutan.

Hal itu juga dilakukan secara nasional seperti saat pemilihan presiden lalu. Tapi data yang diunggah itu bukan hasil akhir perhitungan KPU. Perhitungan akhir tetap didasarkan dari rekapitulasi suara berjenjang TPS, PPK dan KPU Kota Yogyakarta.

Secara terpisah, Ketua Tim Pemenangan Paslon 2 Harjadi Suyuti-Heroe Poerwadi, Muhammad Sofyan meminta KPU agar merekap suara di

..... Sambungan halaman 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
kecamatan sesuai prosedur. Terutama dalam pembukaan kotak suara tidak sah harus berdasar, misalnya ada kejangsalan data dan disetujui oleh Panitia Pengawas.	pilihan pemilih. Dia mengklaim sekitar 14.000 surat suara tidak sah bisa terjadi karena pemilih kecewa.	Biasa	☐ Untuk Ditanggapi ☐ Untuk Diketahui ☐ Jumpa Pers
"Jika tidak ada kejangsalan, kami keberatan," ujar Sofyan di posko paslon nomor 2.	"Bisa jadi itu memang sengaja golput karena kecewa. Kami juga telah menginstruksikan enam parpol pengusung, pendukung dan saksi agar tidak terpancing dengan tindakan provokatif. Cukup kejadian di Kraton," ucapnya.		Kepala sekretaris
Sedangkan terkait banyaknya surat suara tidak sah, dia berpendapat hal itu adalah			Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005